



salinan

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 188.4/Kep.24-PUU/DPRD/2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Jo. Pasal 152 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati selanjutnya dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk disampaikan pada rapat paripurna dan ditetapkan sebagai program pembentukan peraturan daerah dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa rapat pembahasan dan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah melalui koordinasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah berakhir;
 - c. bahwa hasil rapat tersebut telah dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam rapat Badan Musyawarah beserta catatan-catatannya, sehingga perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E);

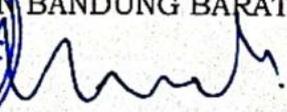
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bandung Barat Nomor 188.342/2666/Hkm/2021 Perihal Penyampaian Hasil Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun Anggaran 2022, tanggal 18 Oktober 2021;
 2. Surat Bupati Bandung Barat Nomor 188.342/3096-Bag.Huk/2021 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Dalam Propemperda Tahun Anggaran 2022, tanggal 24 November 2021;
 3. Risalah Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 15 November 2021 dan 29 November 2021;
 4. Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 30 November 2021;
 5. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 30 November 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.
- KEDUA : Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 November 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

RISMANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 188.4/Kep.24-PUU/DPRD/2021
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2022

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

I. RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2041
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Multi Guna Sarana Bandung Barat Menjadi Perseroan Daerah (Perseroda)
10.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan
11.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung
12.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
13.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah

II. RAPERDA USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang <i>Smart City</i>
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Drainase
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
10.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
11.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah
12.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan
13.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan
14.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Jalan
15.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Mata Air
16.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Konversi Lahan dan Air.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



BISMANTO